



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 Page 2493-2503

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Nagari dalam Pengelolaan Dana Desa Nagari Jambak Kabupaten Pasaman

Irya Mustika Huriyati^{1✉}, Khairul²

(1) Magister Manajemen, Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukittinggi

(2) STISIP Imam Bonjol Padang

Email: iera2609@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan kapasitas pemerintahan Nagari dalam pengelolaan dana desa Nagari Jambak Kabupaten Pasaman. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan desain study kasus. Penelitian dilakukan pada Nagari jambak sebagai pengelola kegiatan dana desa, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisa data Milles and Hubermen mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Nagari jambak telah berhasil mengembangkan organisasi lewat kepemimpinan yang efektif melalui sistem manajemen yang baik, pengelolaan keuangan yang transparan dan partisipasi Masyarakat dalam pengemabilan Keputusan serta terjalannya komunikasi yang efektif baik secara vertical , horizontal maupun informal. Budaya kerja tim dan kolaborasi yang baik serta struktur manajerial yang jelas menunjukkan kapasitas pemerintah dalam mengelola sumber daya secara efektif dan akuntabel, sesuai dengan prinsip good governance yang meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan efektivitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: *Pengembangan Kapasitas, Pengelolaan, Dana Desa*

Abstract

This research aims to analyze the capacity development of the Nagari government in managing Nagari Jambak village funds, Pasaman Regency. The research method used is qualitative with a case study design. Research was conducted at Nagari Jambak as the manager of village fund activities. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. Milles and Huberman's data analysis techniques start from data collection, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The research results show that Nagari Jambak has succeeded in developing the organization through effective leadership through a good management system, transparent financial management and community participation in decision making as well as establishing effective communication both vertically, horizontally and informally. A culture of good teamwork and collaboration as well as a clear managerial structure shows the government's capacity to manage resources effectively and accountably, in accordance with the principles of good governance that improve community welfare and the effectiveness of village fund management.

Keywords: Capacity Development, Management, Village Funds

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, telah memunculkan implikasi yang sangat luas dalam tata kelola pemerintah khususnya desa. Layaknya sebuah daerah otonom, maka desa atau sebutan lainnya, telah berubah menjadi daerah otonom tersendiri dalam tatanan Pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut (*Undang - Undang No.6 Tahun 2014, 2014*) adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebutan desa khusus di Propinsi Sumatera Barat dikenal dengan sebutan Nagari. Nagari yang dimaksudkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 adalah Kesatuan masyarakat hukum adat, dari segi geologis dan historis, memiliki batasan wilayah khusus, memiliki kekayaan tersendiri, berhak untuk memilih pemimpin melalui musyawarah, serta bertanggung jawab atas pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat setempat. Ini dilakukan berdasarkan filosofi dan norma adat, yang bersumber dari prinsip "adat basandi syara' – syara' basandi kitabullah" dan/atau berasal dari asal usul serta tradisi setempat di wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014, Nagari di Sumatera Barat mendapatkan anggaran yang cukup besar setiap tahunnya melalui Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) agar dapat mengelola potensi yang dimiliki dan dapat meningkatkan kesejahteraan kemakmuran ekonomi serta pembangunan Nagari, sesuai dengan pasal 72 UU Nomor 6 tahun 2014 yang menyatakan salah satu pedapatan desa bersumber dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara . Sejalan dengan yang dikemukakan (Raharjo, 2020) berpendapat, agar nagari mampu menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan nagari maka nagari berhak memiliki sumber – sumber pendapatan. Dana desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pedapatan desa.

Keberhasilan Nagari dalam mewujudkan pembangunan nagari terutama dalam mengefektifkan penggunaan Dana Desa dalam setiap kegiatan, sangat dipengaruhi adanya kepedulian dan kualitas SDM dalam menggerakan pemerintahan itu sendiri. Sehingga pengembangan kapasitas menjadi suatu hal yang mutlak untuk dilakukan. Pengembangan kapasitas tidak hanya berfokus pada peningkatan keterampilan individu, tetapi juga mencakup seluruh aspek organisasi, termasuk sistem manajemen, kebijakan target pencapaian, strategi pelaksanaan dan peraturan organisasi (Hardjanto, 2006:21).

(Grindle, 1997) juga mengungkapkan bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan dalam bidang pemerintahan yaitu serangkaian strategi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan daya tanggap terhadap kinerja suatu organisasi. Tujuan pengembangan kapasitas adalah agar individu, organisasi dan sistem yang ada dapat dipergunakan secara efektif dan efisien, sehingga pencapaian tujuan pembangunan nagari dapat terealisasikan dengan baik dan penggunaan Dana Desa tepat sasaran. Pemerintah nagari dalam merumuskan strategi pelaksanaan Dana desa dengan meningkatkan pengembangan kapasitas dari seluruh elemen stakeholder yang terlibat baik itu Pemerintah Nagari, organisasi lokal dan masyarakat lokal. Pencapaian lainnya yang diharapkan dari pengembangan kapasitas adalah terciptanya sebuah pemerintahan yang bersifat good governance sebagaimana yang diharapkan masyarakat.

Nagari Jambak telah membuktikan bahwa pemerintahannya mampu mengelola amanah UU Desa dalam rangka kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat pada tabel laporan realisasi capaian keluaran dana desa dengan tingkat penyerapan anggaran mendekati nilai 100%, baik yang digunakan untuk pembangunan pembangunan fisik, pemberdayaan masyarakat dan Bantuan Tunai Langsung (BLT).

Tabel 1. Laporan Realisasi Capaian Keluaran Dana Desa

No.	Tahun	Pagu Dana	Anggaran	Realisasi	Alokasi Dana	% Capaian Keluaran
1	2021	Rp. 941.256.000,-	450.900.000,-	450.664.364,-	Pembangunan Fisik	95%
		0,-	6.160.000,-	6.160.000,-	Pemberdayaan	100%
			219.600.000,-	214.200.000,-	BLT	98%
2	2022	Rp. 757.622.000,-	457.360.000,-	456.156.500,-	Pembangunan Fisik	98%
		0,-	4.359.181,-	4.359.181,-	Pemberdayaan	100%
			306.000.000,-	306.000.000,-	BLT	100%
3	2023	Rp. 751.843.000,-	325.000.000,-	324.607.610,-	Pembangunan Nagari	100%
		0,-	124.007.710,-	117.459.050,-	Pemberdayaan	92%
			187.200.000,-	187.200.000,-	BLT	100%

Dalam peraturan Bupati Pasaman Nomor 14 tahun 2019 dijelaskan bahwa alokasi dana dari pemerintah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang disebut dana desa merupakan bagian dari dana transfer dari pemerintah ke pemerintah kabupaten. Kabupaten Pasaman yang berjumlah 37 nagari mendapatkan dana desa untuk anggaran tahun 2022 dengan total sebesar Rp.42.840.849.000,-.

Tabel 1. Rincian Dana Desa Setiap Nagari Tahun 2022

No	Nama Desa	Alokasi dana desa (Rp)
1.	Limo Koto	1.024.663.000
2.	Koto Kaciak	1.001.607.000
3.	Ganggo Mudiak	1.157.959.000
4.	Ganggo Hilia	1.114.092.000
5.	Tanjung Baringin	1.031.733.000
6.	Jambak	757.622.000
7.	Durian Tinggi	906.006.000
8.	Pauah	928.022.000

9.	Aia Manggih	1.381.392.000
10.	Sundata	1.123.473.000
11.	Panti	1.210.989.000
12.	Panti Timur	1.395.644.000
13.	Panti Selatan	1.358.374.000
14.	Muara Tais	1.150.643.000
15.	Lubuak Gadang	868.890.000
16.	Pintu Padang	780.371.000
17.	Simpang Tonang	1.398.992.000
18.	Cubadak	1.566.048.000
19.	Malampah	1.275.735.000
20.	Ladang Panjang	1.121.955.000
21.	Binjai	1.338.635.000
22.	Taruang Taruang	1.319.917.000
23.	Padang Mentinggi	1.088.176.000
24.	Silayang	1.228.941.000
25.	Muaro Sei Lolo	1.565.732.000
26.	Alahan Mati	1.090.732.000
27.	Simpang	1.076.436.000
28.	Padang Gelugur	1.127.348.000
29.	Sontang Cubadak	959.634.000
30.	Sitombol	790.291.000
31.	Bahagia	1.297.619.000
32.	Koto Nopan	1.014.900.000
33.	Koto Rajo	1.839.273.000
34.	Languang	965.036.000
35.	Lansek Kadok	988.105.000
36.	Lubuak Layang	1.158.288.000
37.	Tanjung Betung	1.437.576.000

Berdasarkan tabel rincian dana desa tahun 2022, terlihat nagari jambak menerima anggaran dana desa hanya Rp.757.622.000,-. Hal ini sesuai dengan Penjelasan pasal 72 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2016 menyatakan bahwa besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan (1) jumlah penduduk , (2) Angka Kemiskinan , (3) Luas Wilayah, (4) Tingkat kesulitan geografis. Akan tetapi berdasarkan laporan efektifitas penggunaan anggaran nagari jambak pada tahun

2021,2022 dan 2023 menunjukkan data yang sangat efektif.

Keberhasilan dana desa di nagari jambak juga dapat dilihat dari pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM). dimana pada penetapan status *Nagari* tahun 2023 Nagari jambak memiliki nilai IDM 0,6444 dengan status IDM 2023 sebagai *Nagari* berkembang. Indeks Desa Membangun (IDM), dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan Desa. IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa dan peningkatan kualitas kehidupan desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen UU N0.6 Tahun 2014. Indeks Desa Membangun mengklasifikasikan Desa dalam lima status yakni:

Tabel 2. Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM

No.	Status Desa	Nilai Batas
1	Sangat Tertinggal	$\leq 0,491$
2	Tertinggal	$>0,491$ dan $\leq 0,599$
3	Berkembang	$>0,599$ dan $\leq 0,707$
4	Maju	$>0,707$ dan $\leq 0,815$
5	Mandiri	$>0,815$

IDM mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk ekonomi, pelayanan, dan lingkungan. Dalam pengelolaan dana desa, nilai IDM dapat mengindikasikan bahwa penggunaan dana desa di Nagari Jambak telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan berbagai aspek pembangunan. 1) secara ekonomi, dana desa memberikan dampak cukup besar dalam peningkatan perekonomian masyarakat. 2) melalui pelayanan, dana desa memberikan dampak signifikan terutama dalam penyediaan fasilitas kesehatan, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. 3) dalam konteks lingkungan, penggunaan dana desa dapat memberikan perubahan nyata terhadap fasilitas umum, menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat Nagari Jambak.

"Eksploitasi diri", juga sudah mulai dilakukan oleh pemerintah nagari guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari. Pengelolaan atas kekayaan nagari dan pemanfaatan sumberdaya alam yang dimiliki nagari, perlu dilakukan dengan terencana dan berkesinambungan. Pernyataan ini didukung dengan keberhasilan Nagari Jambak mendapat penghargaan Pembangunan desa berkelanjutan award 2022 untuk kategori promosi desa wisata. Pembangunan desa berkelanjutan award 2022 tersebut merupakan salah satu bentuk motivasi menyemangati percepatan pengembangan desa wisata nusantara terkhusus di kabupaten Pasaman. Pencapaian ini karena Nagari Jambak mampu

membangun nagari salah satunya dengan memanfaatkan pengelolaan Dana Desa. Salah satu pembangunan yang menjadi icon dari desa wisata di nagari jambak ini adalah pembangunan jembatan yang menghubungkan nagari dengan lahan pertanian yang menjadi salah satu penggunaan dana desa pada tahun 2021.

Penelitian tentang pengembangan kapasitas sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Murray (2009), Spoth, Bierman, Redmond (2004) bahwa pengembangan kapasitas kelembagaan merupakan alternatif solusi dan serangkaian kegiatan berbasis peningkatan mutu.

(Prasetyo et al., 2020) dalam penelitiannya tentang menyimpulkan bahwa eksistensi kelembagaan darul amin melakukan berbagai upaya dalam berbagai tingkatan yaitu tingkatan sistem, tingkatan organisasi dan tingkatan individual.

(Buchari et al., 2017) dalam penelitiannya tentang kapasitas kelembagaan di kecamatan Tarong kaler , Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, menyimpulkan bahwa pengembangan kapasitas desa tangguh bencana diartikan sebagai upaya peningkatan kemampuan dalam menghadapi penanggulangan bencana mulai dari tahap prabencana hingga pasca bencana.

(Khairul et al., 2019) dalam penelitiannya tentang pengembangan kapasitas kelembagaan untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten Pasaman Barat menyimpulkan bahwa BPBD Pasbar masih menemukan kesulitan klasik dalam menjalankan tugasnya menangani bencana, sementara Kab.Pasaman Barat telah "akrab" dengan bencana alam. Belum ada upaya lebih lanjut yang dilakukan untuk berinvestasi pada organisasi dengan mengembangkan kapasitas kelembagaan dalam mencegah kerugian yang berlebihan akibat bencana.

Sejumlah studi memang telah memanfaatkan pendekatan pengembangan kapasitas dalam berbagai sektor, baik dalam bidang pendidikan ataupun sektor penyelenggaraan Pemerintahan, namun masih terdapat celah pemanfaatan pendekatan pengembangan kapasitas dalam pemerintahan Desa, lebih khusus lagi pada persoalan pengelolaan Dana Desa, dengan berfokus pada pengembangan kapasitas organisasi. Menurut Leavit dalam Djatmiko (2004) mengemukakan bahwa pengembangan kapasitas organisasi ini menekankan pada pengembangan sumber daya fisik, pengembangan proses operasional dan pengembangan SDM sehingga perlunya dilihat apakah pengembangan kapasitas mempunyai peran besar dalam hal keberhasilan pembangunan di sebuah *Nagari* khususnya dalam pengelolaan Kegiatan Dana Desa.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi pengembangan kapasitas dalam

pencapaian terwujudnya pembangunan desa yang efektif dan efisien. Dengan memperhitungkan segenap potensi yang dimiliki, tim kerja yang profesional dan pola pelaksanaan pembangunan yang tepat. Begitu besar harapan, yang ditumpangkan kepada pemerintah nagari dalam pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini. "Desa membangun Indonesia" benar-benar menjadi sebuah kenyataan. Tidak ada lagi mimpi yang hilang ketika kita terbangun dari tidur.(Dachlan , 2014)

Pengembangan kapasitas sangat diperlukan disebuah organisasi termasuk instansi pemerintahan. Di dalam pemerintahan nagari diperlukan juga pengembangan kapasitas terkait penyelenggaraan pemerintahan nagari yang sesuai dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa.,maka penelitian ini penting dilakukan dengan judul "Pengembangan Kapasitas Pemerintahan Nagari Dalam Pengelolaan Dana Desa Nagari Jambak Kabupaten Pasaman"

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan desain study kasus. Penelitian dilakukan pada Nagari jambak sebagai pengelola kegiatan dana desa, Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penentuan informan dibagi menjadi dua yaitu informan sumber primer (pokok) dan informan sumber sekunder (tambahan) (Sugiono, 2010). Sebagai gambaran pengelompokan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Informan (Primer)

Informan utama merupakan stakeholder yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung dengan suatu kebijakan, program, atau proyek. Stakeholder utama dalam penelitian ini ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses implementasi kebijakan.

- a. IF 1 : Wali Nagari Jambak
- b. IF2 : Sekretaris Nagari

2. Informan Pendukung (Sekunder)

Informan pendukung adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, program, dan proyek, tetapi memiliki andil, pengaruh, atau peran serta dalam menunjang berjalannya suatu kebijakan, program, atau proyek. Informan pendukung (Skunder) dalam hal ini adalah:

- a. IF3 : Ketua TPK (Tim Pengelola Kegiatan)
- b. IF4 : Ketua Bamus (Badan Muswarah Nagari)
- c. IF5 : Pendamping Desa

- d. IF6 : Ketua KAN (Kerapatan Adata Nagari)
- e. IF7 : Ketua Kelompok Tani (Masyarakat)
- f. IF8 : Ketua Pemuda

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisa data Milles and Huberman mulai dari peengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepemimpinan

Kepemimpinan Transformasional

Kepemimpinan dalam sebuah instansi pemerintah menjadi tolak ukur berjalannya suatu tujuan organisasi. Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan nagari Jambak telah terlaksana pola kepemimpinan yang partisipatif dan transparan. Karakteristik sebagai pemimpin yang partisipatif dan transparan tergambar dari diri wali nagari Jambak dalam memimpin nagari Jambak dan juga menjadi faktor penentu dalam capaian keberhasilan pengelolaan dana desa. Dengan melakukan pendekatan partisipatif, wali nagari selalu melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa suara dan kebutuhan setiap anggota masyarakat didengar dan dipertimbangkan. Disisi lain, transparansi dalam kepemimpinan wali nagari memastikan bahwa setiap langkah dalam pengelolaan dana desa dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat, mengurangi potensi penyalahgunaan dan meningkatkan akuntabilitas.

Kepemimpinan yang partisipatif dan transparan wali nagari memberikan dampak nyata dalam peningkatan kualitas infrastruktur nagari seperti pembangunan jalan usaha tani yang memudahkan petani dalam kegiatan pertaniannya, terbangunnya fasilitas kesehatan dan juga berdampak pada nilai (IDM) Indeks Desa Membangun Nagari Jambak yang pada tahun 2023 berada pada status nagari berkembang dengan nilai IDM 0,6444. Penelitian ini sejalan dengan temuan pada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa kepemimpinan yang partisipatif memiliki dampak positif yang signifikan. Studi yang dilakukan oleh (Khairuddin dan Badriyah,2024) mengemukakan bahwa tradisi yang mengedepankan hubungan kekeluargaan, kejujuran, kepercayaan dan semangat kebersamaan merupakan prasyarat untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah nagari sebagai pihak yang memiliki kuasa atas pengelolaan dana desa dan masyarakat sebagai penerima manfaat. Kepemimpinan yang transparan dan partisipatif juga dapat dilihat sebagai implementasi praktis dari teori (Grindle,1997) tentang '*good*

governance, dimana grindle menekankan pentingnya akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi korupsi di tingkat lokal. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan dan memastikan informasi khususnya dalam hal ini terkait alokasi dan penggunaan dana desa tersedia secara terbuka, kepemimpinan nagari tidak hanya membangun kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya publik. juga menekankan pentingnya akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan transparansi dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi korupsi di tingkat lokal.

Kepemimpinan Ninik Mamak

Hasil temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa wali nagari bersinergi dengan ninik mamak dalam menjalankan pemerintahan nagari. Dalam menjalankan roda pemerintahan, di Nagari jambak tidak bisa terlepas dari peran kepemimpinan ninik mamak. Ninik mamak adalah sifat ideal seorang laki – laki Minangkabau, dari suatu kaum, dituakan dan jadi *"tampek Baiyomalah"* (bermusyawarah) sekalipun dia masih muda. Ninik mamak merupakan kelompok penentu setiap keputusan yang menyangkut hajat orang banyak dalam masyarakat. Maka setiap tindak tanduk dan perilaku adat masyarakat Minangkabau harus berdasarkan kesepakatan ninik mamak. Sebaliknya, tidak akan terlaksana dan tidak akan diakui ketika pekerjaan menyangkut kepentingan orang banyak tanpa persetujuan *"Ninik Mamak nan Gadang Basa Batuah"* (dibesarkan dan dituakan).

Sinergi antara kepemimpinan wali nagari dan ninik mamak memiliki dampak terhadap kelancaran pembangunan di nagari. Kerja sama yang harmonis antara wali nagari dan ninik mamak ini menciptakan kesatuan visi dan misi dalam memajukan nagari. Hal ini dapat terlihat dari pembangunan infrastruktur di nagari jambak. Tentunya untuk pembangunan ini akan ada tanah masyarakat yang digunakan. Ketika wali nagari dan ninik mamak bersatu, masyarakat lebih mudah menerima dan mendukung inisiatif pembangunan, karena mereka merasa kepentingan mereka diwakili oleh pemimpin yang dihormati dan dipercaya. Selain itu, dengan adanya dukungan penuh dari ninik mamak, pembebasan tanah seringkali dapat dilakukan tanpa biaya, karena masyarakat secara sukarela menyerahkan tanahnya demi kemajuan bersama.

Sinergi yang terjalin antara wali nagari dan ninik mamak serta alim ulama bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh (Chlaudina, 2021) bahwa pada tingkat provinsi fungsi, peran, kesempatan serta wewenang pada lembaga KAN dan MUI nyaris tidak terdengar dalam mengatur anak nagari sesuai dengan namanya masing – masing.

Walaupun tidak mengakui sistem pemerintahan tungku tigo sajarangan, nagari beradat dan bersyarak seperti minangkabau, keberadaan ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai adalah suatu keniscayaan mulai dari tingkat provinsi sampai kepada tingkat pemerintahan yang paling rendah. Dalam pemerintahan nagari juga masih ditemukannya pola kepemimpinan Tungku Tigo sajarangan Dimana peran ninik mamak sebagai kelompok penentu setiap Keputusan tidak bisa ditinggalkan, setiap tindak tanduk dan perilaku adat Masyarakat Minangkabau harus berdasarkan kesepakatan ninik mamak. Seperti pepatah minang " *ditinggikan seranting dan didahulukan selangkah*" begitulah ninik mamak dalam tungku tigo sajarangan melaksanakan tugas – tugas kepemimpinannya. Menurut (Handrianto, 2012) kepemimpinan Tungku tigo sajarangan memenuhi kriteria diantaranya : 1) kepedulian sosial yang tinggi, 2) memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, dan 3) pemikiran yang progresif dan berorientasi masa depan.

2. Komunikasi

Komunikasi Vertikal

Pemerintahan nagari merupakan unit pemerintahan terkecil yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Komunikasi memegang peranan yang sangat penting dalam pemerintahan nagari yang langsung berinteraksi dengan masyarakat. Hasil temuan dari penelitian ini adalah pemerintah nagari jambi telah melakukan penguatan koordinasi dan komunikasi vertikal. Wali nagari sebagai pemimpin nagari berhasil menjalankan perannya sebagai penghubung antara pemerintah daerah dan masyarakat. Komunikasi vertikal dalam organisasi sangat memiliki kontribusi yang cukup besar dalam perjalanan pemerintahan nagari jambi. Dampak dari komunikasi vertikal ini dibuktikan dengan diberikannya penghargaan yang diberikan kepada nagari jambi sebagai desa wisata berbasis budaya dari kementerian desa dalam ajang lomba desa berkelanjutan pada tahun 2022. Pengakuan ini tidak terlepas dari peran penting komunikasi vertikal ini. Wali nagari jambi mampu menyampaikan visi dan program kerja dengan baik, baik kepada perangkat nagari maupun kepada pemimpin daerah.

Sesuai dengan apa yang disampaikan (Rosady,2003:81) bahwa arus komunikasi vertikal memberikan instruksi, petunjuk, informasi, penjelasan dan penugasan lain. Dalam teori relationship manajemen dijelaskan bahwa peran komunikasi sebagai alat inisiasi, mengembangkan dan memelihara hubungan dalam organisasi, yang mana proses relasi ada pertukaran persepsi, atribut dan identitas yang berbeda dan antara organisasi dan publik dimungkinkan saling mempengaruhi.

Komunikasi Horizontal dan Informal

Komunikasi yang horizontal antara unsur – unsur lembaga, antara perangkat nagari di dalam pemerintahan nagari terjalin dengan baik. Koordinasi yang efektif di antara lembaga – lembaga ini menciptakan sinergi yang positif, memperkuat kerja sama dalam pelaksanaan tugas – tugas pemerintahan. Dengan terjalinnya komunikasi horizontal yang baik, pemerintah nagari mampu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, serta menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi semua pihak yang terlibat.

Hubungan komunikasi horizontal yang sifatnya mendatar dilakukan oleh antara lembaga maupun antar perangkat nagari pada tingkatan atau jabatan yang sama. Komunikasi horizontal yang dilakukan tidak sama dengan komunikasi vertikal yang bersifat lebih formal. Komunikasi ini biasanya dilakukan lebih banyak pada situasi informal. Dampak dari komunikasi horizontal ini terlihat jelas dalam berbagai aspek pembangunan nagari. Pertama, adanya rasa kesetaraan dan penghargaan terhadap setiap individu mendorong partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Ketika semua suara didengar dan dipertimbangkan, keputusan yang diambil menjadi lebih demokratis dan mencerminkan kebutuhan serta aspirasi warga. Ini memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dana desa benar – benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

(A'la, 2021) menyatakan bahwa hubungan komunikasi horizontal yang sifatnya mendatar yang dilakukan anggota organisasi pada tingkatan kedudukan atau jabatan yang sama. Komunikasi ini tidak sama dengan komunikasi vertikal yang bersifat lebih formal. Komunikasi ini biasanya dilakukan oleh anggota organisasi lebih banyak pada situasi tidak formal, dan biasanya pada saat formal dilakukan dalam pekerjaan yang membutuhkan koordinasi dengan bidang lain.

Komunikasi horizontal yang juga sering dilakukan secara informal dilakukan pemerintahan nagari dengan menggunakan surau surau maupun organisasi – organisasi sosial kemesyarakat sebagai media dalam komunikasi dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang ditemui (Mahmudah, 2015) bahwa pentingnya memfungsikan komunikasi informal dalam berkomunikasi dengan masyarakat. Hal ini menjadi sangat penting sebab untuk melakukan komunikasi secara formal dengan masyarakat nagari secara umum dan dihadiri oleh banyak orang memerlukan waktu, tenaga serta biaya yang tidak sedikit. Sehingga untuk dapat mengefektifkan semua potensi yang ada maka dipandang komunikasi informal merupakan salah satu solusi dalam penyampaian pesan dari pemerintah nagari kepada masyarakat.

3. Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi profesionalisme kerja sebuah organisasi dalam hal ini pemerintahan nagari. Hasil temuan dari penelitian ini adalah adanya budaya kerja sama tim dan kolaborasi dalam menjalankan pekerjaan dalam pemerintahan nagari. Budaya organisasi di Nagari Jambak yang mengedapnakan kerja sama tim, selaras dengan tradisi gotong royong dalam budaya Minang, memiliki peran penting dalam keberhasilan pembangunan nagari.

Budaya organisasi yang diterapkan di nagari jambak adalah pendekatan kerja tim yang terstruktur di nagari. Dimana semua program dan kegiatan dikoordinasikan oleh wali nagari dan dilaksanakan secara kolaboratif. Pemerintah nagari jambak selalu pertama dalam hal pelaporan dan menyelesaikan tupoksinya ddalam kegiatan pengelolaan dana desa, ada Upaya selalu melakukan perbaikan pencapaian kerja pengelolaan keuangan dana desa. Bagusnya organisasi dalam pengelolaan keuangan dana desa bisa dilihat dengan prestasi yang diraih oleh nagari jambak. Sejalan dengan studi Grindle dan Hilderbrand bahwa kinerja sektor public yang efektif lebih cenderung didorong oleh budaya organisasi yang kuat, praktek manajemen yang baik dan jaringan komunikasi yang feketif daripada dengan aturan atau prosedur. Budaya organisasi yang dimaksud dalam penelitian ini diarahkan kepada terlaksananya siklus kegiatan pengelolaan keuangan nagari.

4. Struktur Manajerial

Struktur Organisasi

Dalam pemerintahan nagari, struktur organisasi yang jelas dan terorganisir tidak hanya akan mempermudah koordinasi dan komunikasi, tetapi memastikan bahwa setiap fungsi dan peran dalam pemerintahan nagari dapat berjalan optimal. Hasil temuan pada penelitian ini adalah pemerintah nagari memiliki struktur hirarkis yang jelas . Dari temuan ini terlihat bahwa setiap elemen termasuk lembaga – lembaga dalam pemerintah nagari jambak memiliki tugas dan tanggung jawab yang terlaksana dengan baik. Dalam hal ini, pembagian tugas yang jelas antara wali nagari, perangkat nagari dan lembaga yang ada di nagari membantu memastikan bahwa setiap keputusan diambil oleh pihak yang tepat dan setiap tugas dilaksanakan oleh individu yang berkompeten sehingga mengurangi adanya tumpang tindih tugas atau peran, yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemerintahan.

(Grindle, 1997) meyakini bahwa struktur manajerial yang baik adalah salah satu elemen penting dari good governance. Struktur yang jelas dan koordinasi yang baik

meningkatkan kapasitas pemerintah untuk mengelola sumber daya secara efektif dan akuntabel. Dalam penelitian ini, struktur hirarki yang jelas dan mekanisme koordinasi yang baik di nagari adalah contoh implementasi good governance yang dapat meningkatkan pengelolaan dana desa.

SOP

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman yang memastikan setiap langkah dan tindakan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga tercipta tata kelola yang transparan dan berdaya guna. Hasil dari penelitian ini bahwa pemerintah nagari jambak telah melaksanakan kepatuhan terhadap regulasi atau SOP dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pengelolaan dana desa. Pemerintah nagari jambak telah mengikuti regulasi dan SOP yang ditetapkan untuk memastikan bahwa semua proses yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dana desa khususnya dapat dilakukan secara sistematis, transparan dan akuntabel.

Kepatuhan terhadap regulasi dan SOP dalam pengelolaan dana desa memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dan efektivitas pelaksanaan dana desa. Ketika pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan SOP yang telah ditetapkan, proses administrasi menjadi lebih terstruktur dan transparan. Hal ini memungkinkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, karena setiap prosedur telah diatur dengan jelas. Selain itu, kepatuhan ini juga memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran, sehingga pelaksanaan dana desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Akibatnya, realisasi dana desa dapat mendekati 100%, karena tidak ada penundaan atau penyalahgunaan dana yang terjadi. Dengan demikian, kepatuhan terhadap regulasi dan SOP pengelolaan dana desa tidak hanya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari, tetapi juga mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan dan berdaya guna tinggi.

Sejalan dengan (Winarno, 2012) menyatakan bahwa SOP memiliki manfaat bagi organisasi – organisasi dengan prosedur – prosedur perencanaan yang luwes dan kontrol besar atas program – programnya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Pengembangan kapasitas kelembagaan dari focus kepemimpinan dinagari jambak menunjukkan adanya gaya kepemimpinan partisipatif dan transparan. Sinergi antara

kepemimpinan wali nagari dan ninik mamak di Nagari Jambak punya peran penting dalam kelancaran dan keberhasilan pengelolaan dana desa. Penguatan koordinasi dan komunikasi vertikal yang efektif di Pemerintah Nagari Jambak telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana desa. komunikasi horizontal yang efektif di Pemerintahan Nagari Jambak memperkuat kerja sama dan partisipasi masyarakat, meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan masyarakat baik secara formal maupun informal. Budaya kerja sama tim dan kolaborasi yang berakar pada nilai gotong royong Minangkabau di Nagari Jambak telah meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan integritas dalam pengelolaan dana desa. Kepatuhan Pemerintah Nagari Jambak terhadap regulasi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pengelolaan dana desa telah meningkatkan kualitas pelayanan, transparansi, dan efektivitas pelaksanaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- A'la, C. N. (2021). *Pengaruh Persepsi Kemudahan Penggunaan, Efektivitas Dan Risiko Terhadap Minat Bertransaksi Menggunakan Financial Technology (Fintech) (Studi Pada Masyarakat Kota Medan)*.
- Buchari, A., Santoso, M. B., & Marlina, N. (2017). Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Desa Tangguh Bencana Di Kabupaten Garut (Studi Kasus Di Desa Pasawahan Kecamatan Tarogong Kaler). *Jurnal Analisis Kebijakan Dan Pelayanan Publik*, 1–13.
- Dachlan 2014:1. (2014). Pidato Gubernur Sumbar 2021-2023. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 22–31.
- Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building In The Public Sectors Of Developing Countries Harvard Institute for International Development f or Office of Rural and Institutional D.*
- Handrianto, C. (2012). *Paradigma kepemimpinan "tungku tigo sajarangan" di Minangkabau*.
- Khairul, K., Purnaweni, H., & Suwitri, S. (2019). Institutional capacity building for local disaster prevention board of West Pasaman Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*.
- Prasetyo, M. A. M., Bashori, B., & Masriani, M. (2020). Model Capacity Building Pada Pesantren Perbatasan Binaan Dinas Pendidikan Dayah Provinsi Aceh. *INFERENSI: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 14(1), 71–96. <https://doi.org/10.18326/infs13.v14i1.71-96>
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Dana Desa* (Tarmizi (Ed.)). Pt.Bumi Aksara.

Sugiono. (2010). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF & RND*. Alfabeta.
Undang - Undang No.6 Tahun 2014. (2014).
Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS.